

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PENGURANGAN RESIKO BENCANA BERBASIS MASYARAKAT
(COMMUNITY - BASED DISASTER RISK REDUCTION)
Di Desa Wukirharjo, Kecamatan Prambanan**

**Agus Taufiq, Lambang Aji Setiawan* , Unggul Hardisono, Muhammad Nur Aziz,
Muhammad Khoiruddin, Fiky Apriyadi, Nitha Amalia, Septikarani Prima Insani,
Nadia Nuril Ferdaus, Kristy Tri Wardhani, Vina Zulfa Maulana**
**Corresponding author: agustaufiq@uii.ac.id
Universitas Islam Indonesia*

ABSTRACT

The community as the direct beneficiaries of the disaster, as well as the first and direct actors who will respond to the disaster, underlies the national program of Desa Tangguh Bencana (Destana) in order to create a resilient Indonesia. Desa Wukirharjo is a disaster prone area of earthquakes, landslides, strong winds, and drought. The existence of human resource issues, infrastructure, regulatory, institutional, and topography cause Wukirharjo prone to disaster. Disaster Risk Reduction (DRR) aspects should include capacity building of human resources, participatory planning and disaster management institutional governance, with training, mentoring, implementation, and networking methods. Program activities include the preparation of a guideline for the establishment of local/ rural DRR forums and disaster risk reduction guidelines that contain the introduction of disaster prone locations, mitigation, first emergency response, disaster prone maps and disaster evacuation routes, risk reduction of drug use, risk reduction use of chemical pesticides on land and users, safe electrical installation guides, earthquake resistant building guidance, landslide retaining guides, Early warning system, institutional capacity strengthening of FPRB, Bukit Senja masterplan, SID / WEB, disaster preparedness savings program design, disaster simulation in children, and the publication of the implementation of activities. The synergies of all these aspects are disaster-prone maps and evacuation routes, manuals, and implications for human resource capacity building.

ABSTRAK

Masyarakat sebagai penerima dampak langsung dari bencana, dan sekaligus sebagai pelaku pertama dan langsung yang akan merespon bencana, melandasi program nasional Desa Tangguh Bencana (Destana) dalam rangka mewujudkan Indonesia Tangguh. Desa Wukirharjo merupakan wilayah rawan bencana gempa bumi, longsor, angin kencang, dan kekeringan. Adanya permasalahan bidang SDM, sarana prasarana, regulasi, kelembagaan, dan topografi menyebabkan Desa Wukirharjo rawan bencana. Aspek Pengurangan Resiko Bencana (PRB) harus meliputi peningkatan kapasitas SDM, perencanaan partisipatif dan tata kelola kelembagaan penanggulangan bencana, dengan metode pelatihan, pendampingan, implementasi, dan jejaringan. Program kegiatan meliputi penyusunan suatu panduan pembentukan forum PRB daerah/ desa dan panduan pengurangan resiko bencana yang berisi pengenalan lokasi rawan bencana, mitigasi, Penanganan Pertama Gawat Darurat (PPGD), peta rawan bencana dan jalur evakuasi bencana, pengurangan resiko dampak penggunaan obat, pengurangan resiko penggunaan pestisida kimia terhadap lahan dan pengguna, panduan instalasi listrik yang aman, panduan bangunan tahan gempa, panduan tembok penahan longsor, Early warning system, penguatan kapasitas kelembagaan FPRB, masterplan Bukit Senja, SID/ WEB desa, rancangan program Tabungan Siaga Bencana, simulasi bencana pada anak, serta publikasi pelaksanaan kegiatan. Sinergi semua aspek tersebut adalah peta rawan bencana dan jalur evakuasi, buku panduan, dan berimplikasi pada peningkatan kapasitas SDM.

Kata Kunci: Bencana, DRR, PRB, Wukirharjo

PENDAHULUAN

Masyarakat sebagai penerima dampak langsung dari bencana, dan sekaligus sebagai pelaku pertama dan langsung yang akan merespon bencana, melandasi program nasional Desa Tangguh Bencana (Destana) dalam rangka mewujudkan Indonesia Tangguh. Berdasarkan Perka BNPB 01/2012, masyarakat perlu dibekali dalam konteks pemberdayaan agar menjadi tangguh, bukan hanya siap menghadapi bencana. Program-program pemberdayaan merupakan salah satu strategi utama yang diimplementasikan oleh banyak pihak, baik organisasi pemerintah (Kementerian/ Lembaga), organisasi masyarakat sipil, dan juga dunia usaha untuk penguatan kapasitas masyarakat. Pengurangan Resiko Bencana merupakan sektor yang menjadikan program pemberdayaan masyarakat sebagai strategi penting.

Desa Wukirharjo merupakan wilayah rawan bencana. Hal tersebut dikarenakan dari segi sumber daya manusia tentang pengurangan resiko bencana masih minim, minimnya sarana prasarana penunjang pengurangan resiko kebencanaan, belum adanya regulasi dan lembaga tentang pengurangan resiko bencana yang belum ada di tingkat desa, dan wilayah desa dengan topografi yang berbukit-bukit, sehingga kurang terintegrasi dalam pengelolaan pengurangan resiko bencana.

Perpaduan bahaya dan kerentanan meningkatkan dampak bencana yang mengancam hidup dan penghidupan masyarakat. Bencana berdampak terhadap kemunduran sosial-ekonomi dan memiskinkan jutaan penduduk. Pengurangan dampak bencana dan akibat perubahan iklim yang sistematis perlu ditingkatkan guna mendapatkan pengakuan dan komitmen dari para kepala pemerintahan yang didukung oleh lembaga usaha dan masyarakat. Kebijakan politik, hukum, ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya diturunkan melalui upaya membangun kesadaran masyarakat, pengetahuan ilmiah, perencanaan pembangunan yang cermat, penegakan kebijakan dan hukum yang bertanggung jawab, peringatan dini berbasis masyarakat, serta mekanisme kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang efektif. Pengurangan resiko bencana merupakan isu pembangunan lintas batas, baik sektor, agama, ras, sosial, dan lain sebagainya.

Resolusi 1999/63 disusun oleh Dewan Sosial Ekonomi PBB sebagai upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB) dengan menghimbau semua pemerintah untuk membangun dan menguatkan platform-platform multi sektor yang ada di tingkat nasional demi mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, secara ilmiah maupun teknis, untuk menghadapi tantangan kedepan terkait PRB. Perlu upaya mensinergikan

berbagai pelaku atau penggiat kebencanaan lintas sektor agar penanggulangan bencana dapat efektif. Platform atau forum pengurangan risiko bencana terdiri dari para pemangku kepentingan yang membantu menyediakan, memobilisasi pengetahuan, keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk pengambilan kebijakan, perencanaan dan program pembangunan.

Platform/ forum PRB daerah/ desa merupakan wadah independen yang menyatukan berbagai organisasi pemangku kepentingan yang bergerak dan mendukung berbagai upaya PRB di Indonesia. Forum PRB daerah/ desa juga mewadahi semua kepentingan terkait kebencanaan di daerah, serta membantu menyelaraskan berbagai kebijakan, perencanaan dan program pembangunan dan kegiatan PRB ditingkatkan masing-masing, serta mendukung tercapainya tujuan-tujuan PRB di Indonesia. Terwujudnya ketahanan dan ketangguhan bangsa terhadap bencana, selaras dengan tujuan-tujuan global yang termaktub dalam Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Action-HFA 2005-2015*).

Pembentukan Forum PRB Daerah/ desa diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 8 yang mendorong pelibatan forum dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah–Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB). Didalamnya diatur bahwa anggota forum ini meliputi unsur dari pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha. Dalam perkembangannya Platform Nasional (Planas) PRB, yang berdiri sejak tahun 2009, memiliki mandat yang salah satunya adalah mendorong terbentuknya platform atau forum di daerah baik level provinsi, kabupaten/ kota dan desa sebagai upaya mensinergikan peran dan upaya PRB di berbagai tingkatan dan wilayah.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat (*Community-based disaster risk reduction*) di Desa Wukirharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, yang bertujuan meningkatkan kapasitas (ketangguhan) masyarakat pada daerah bencana agar lebih *resilien* menghadapi bencana, terciptanya penanggulangan bencana melalui perencanaan partisipatif, dan tata kelola kelembagaan. Tujuan program kegiatan ini adalah penyusunan suatu panduan pembentukan forum PRB daerah/ desa dan panduan pengurangan resiko bencana yang meliputi pengenalan lokasi rawan bencana, mitigasi, Penanganan Pertama Gawat Darurat (PPGD), peta rawan bencana dan jalur evakuasi bencana, pengurangan resiko dampak penggunaan obat, pengurangan resiko penggunaan pestisida kimia terhadap lahan dan pengguna, panduan instalasi listrik yang aman, panduan bangunan tahan gempa, panduan tembok penahan longsor, *Early warning system*, penguatan kapasitas kelembagaan FPRB,

masterplan Bukit Senja, SID/ WEB desa, rancangan program Tabungan Siaga Bencana, simulasi bencana pada anak, serta publikasi pelaksanaan kegiatan.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan pada program kegiatan ini adalah pelatihan, pendampingan, implentasi dan jejaringan dengan mitra kerjasama pelaksanaan KKN-PPM ini adalah Pemerintah Desa, BPBD Kabupaten Sleman, SAR POLDA DIY dan Tim Relawan FPRB Bandung Bondowoso. Rangkaian pelaksanaan kegiatan adalah melakukan observasi secara menyeluruh di Desa Wukirharjo, Prambanan, Sleman. Data dari hasil observasi menjadi pendukung utama dalam penyusunan rencana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama bulan Agustus 2017 melalui program KKN-PPM Angkatan 55 Universitas Islam Indonesia di Wukirharjo, Prambanan, Sleman. Kegiatan dievaluasi setiap pekan untuk mendapatkan gambaran tercapainya target yang telah ditentukan. Luaran dari program kegiatan ini adalah adanya buku panduan aplikatif pengurangan resiko bencana, peta rawan bencana dan jalur evakuasi, terbentuknya struktur organisasi Pemerintah Desa, FPRB dan KSB di Desa Wukirharjo, Prambanan, Sleman.

Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan selama tiga hari, yakni tanggal 9, 10, dan 12 Agustus 2017, dengan materi hari pertama adalah pengenalan lokasi rawan bencana di Wukirharjo, materi hari kedua mengenai PPGD, dan materi hari ketiga mengenai mitigasi. Pemateri dan peserta pelatihan mendapatkan sertifikat Pelatihan *Disaster Risk Reduction Based Community*.

Pembuatan peta rawan bencana dan jalur evakuasi

Pembuatan peta rawan bencana dan jalur evakuasi diawali dengan melakukan observasi secara langsung ke lokasi-lokasi yang sebelumnya pernah terjadi bencana, dan dengan melakukan wawancara kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Pemetaan lokasi rawan bencana juga dilakukan dengan melibatkan Tim Relawan FPRB Bandung Bondowoso.

Pembentukan Organisasi FPRB dan KSB

Pembentukan organisasi dilakukan dengan membentuk struktur organisasi pemerintah desa yang merupakan perwujudan dari lembaga pemerintah di tingkat desa, kemudian dilanjutkan dengan membentuk serta melakukan pengurusan legalisasi FPRB dan KSB di Wukirharjo.

Penyusunan Buku Panduan DRR

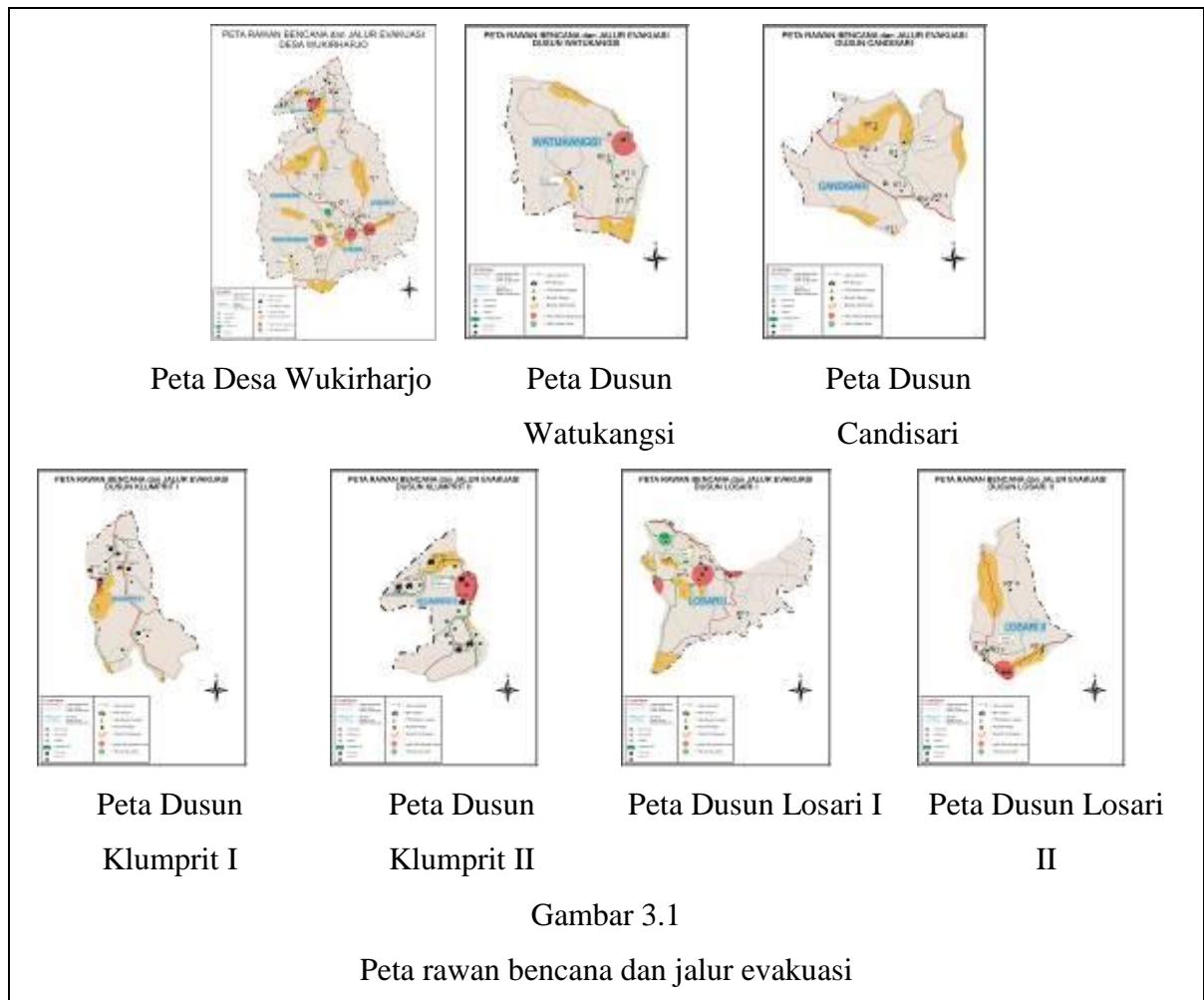
Buku panduan DRR disusun melibatkan seluruh mahasiswa KKN-PPM Angkatan 55 UII Unit 436, 437, dan 438, dengan bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing lapangan. Buku panduan berisi mengenai program kegiatan derivatisasi dari Pengurangan Resiko Bencana yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai bidang keilmuannya. Bidang-bidang tersebut meliputi rancangan program tabungan siaga bencana, pengurangan resiko dampak penggunaan obat/ peran swamedikasi dalam pengurangan resiko bencana, panduan PPGD, panduan pengelolaan sistem informasi desa berbasis web, simulasi mitigasi bencana pada anak-anak dengan melibatkan aspek psikologis, penguatan kapasitas kelembagaan FPRB, pengurangan resiko penggunaan pestisida kimia terhadap lahan dan pengguna, panduan instalasi listrik yang aman, panduan bangunan tahan gempa, panduan tembok penahan longsor, *Early warning system*, *masterplan* Bukit Senja, dan publikasi kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program kegiatan ini bertujuan membuat suatu panduan yang bersifat arahan teknis dan praktis aplikatif bagi para pihak penggiat PRB di daerah/ desa dalam proses inisiasi, pembentukan dan pengorganisasian serta membangun kerjasama multi pihak melalui forum PRB daerah/ desa. Sasaran program kegiatan ini adalah tersedianya acuan serta petunjuk teknis tentang tahapan-tahapan dalam proses pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Daerah/ desa, meningkatnya pemahaman berbagai pemangku kepentingan dalam membangun kerjasama berbagai pihak dalam PRB, meningkatnya partisipasi semua pihak dalam upaya PRB dengan peningkatan swadaya masyarakat dalam pengurangan resiko bencana dan penanggulangan kebencanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat, penanggulangan kebencanaan melalui perencanaan partisipatif, perbaikan sistem tata kelola kelembagaan, perbaikan sistem dan tata kelola desa tangguh bencana, tersedianya peta integratif wilayah potensi rawan bencana, dan terbentuknya model Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat (PRB-BM/ *community-based disaster risk reduction*).

Hasil yang pertama berupa peta rawan bencana dan jalur evakuasi yang disajikan pada Gambar 3.1. Tujuh buah peta yang dibuat yaitu peta Desa Wukirharjo, Dusun Candisari, Dusun Watukangsi, Dusun Klumprit I, Dusun Klumprit II, Dusun Losari I, dan Dusun Losari II. Legenda pada peta yang dibuat meliputi penunjukan area jalan kecamatan, jalan desa, jalan lingkungan, sungai, batas desa, batas padukuhan, balai desa, sekolah, masjid, lapangan, rumah ketua RT dan RW, rumah kepala dukuh, jalur evakuasi, titik kumpul, titik rawan longsor, rumah warga, daerah terdampak, area titik kumpul dusun, dan area titik kumpul akhir. Peta ini

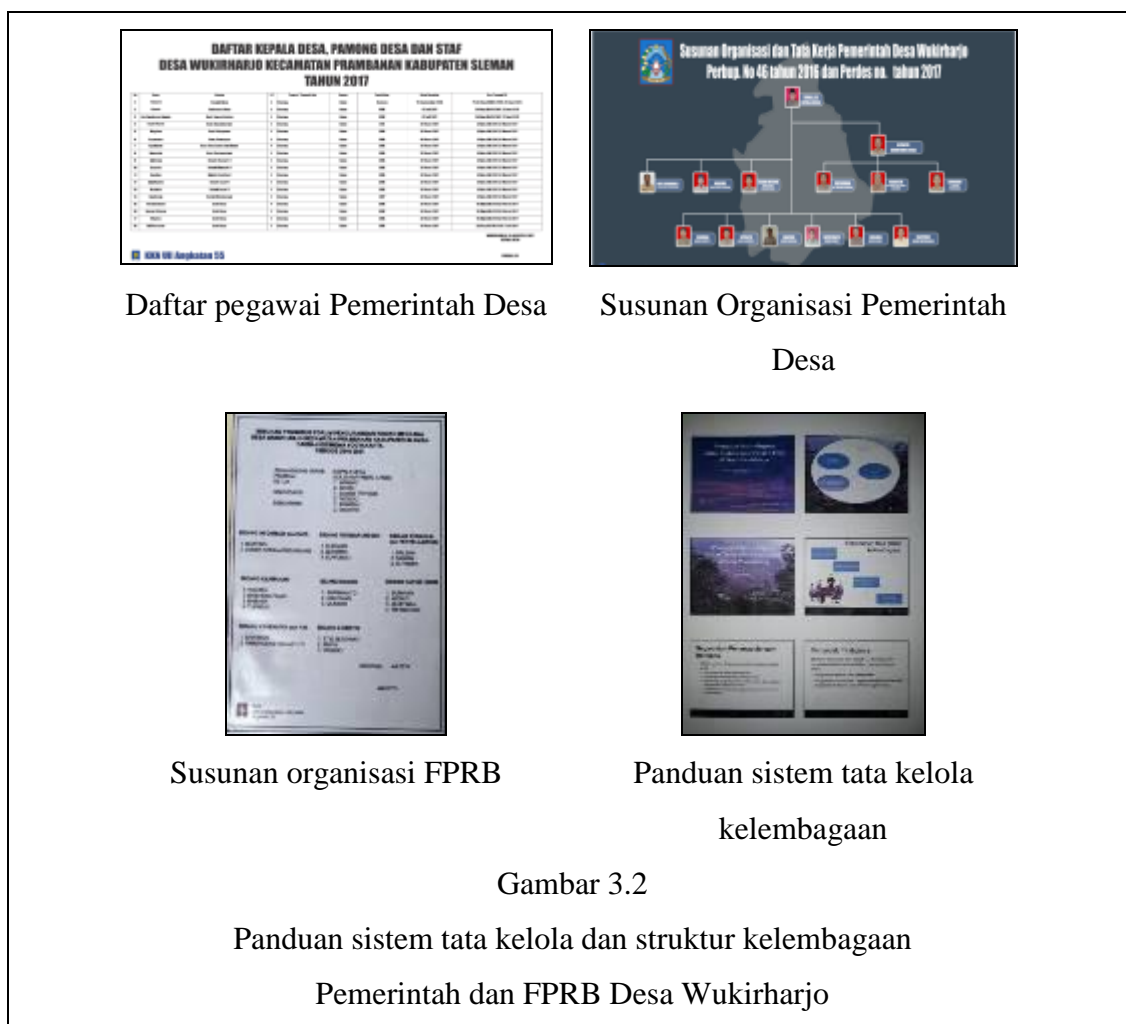
dipasang di tempat yang strategis di wilayah desa/ dusun di Wukirharjo, sehingga seluruh masyarakat dapat mencermati dan mengenali lokasi-lokasi yang rawan bencana, dan dapat melakukan antisipasi-antisipasi terkait tanda-tanda alam yang berkaitan dengan terjadinya bencana.



Hasil dari kegiatan yang terkait dengan organisasi dan kelembagaan disajikan pada Gambar 3.2. Pemahaman mengenai perbaikan sistem tata kelola kelembagaan, dapat menjadikan suatu organisasi lebih efektif dan dinamis. Hal ini perlu didukung dengan adanya struktur organisasi yang didalamnya terdapat personil-personil yang kompeten, serta memahami fungsi ketugasan masing-masing. Organisasi pemerintah maupun non-pemerintah memiliki peran penting dalam menanggulangi bencana alam, setiap daerah pun memilikinya guna mengantisipasi datangnya bencana dengan memiliki strategi yang bersinergi dengan pemerintah pusat maupun berbasis masyarakat. Suatu lembaga atau organisasi dapat mengalami pelemahan yang mempengaruhi penurunan tata kelola atau manajemen organisasi

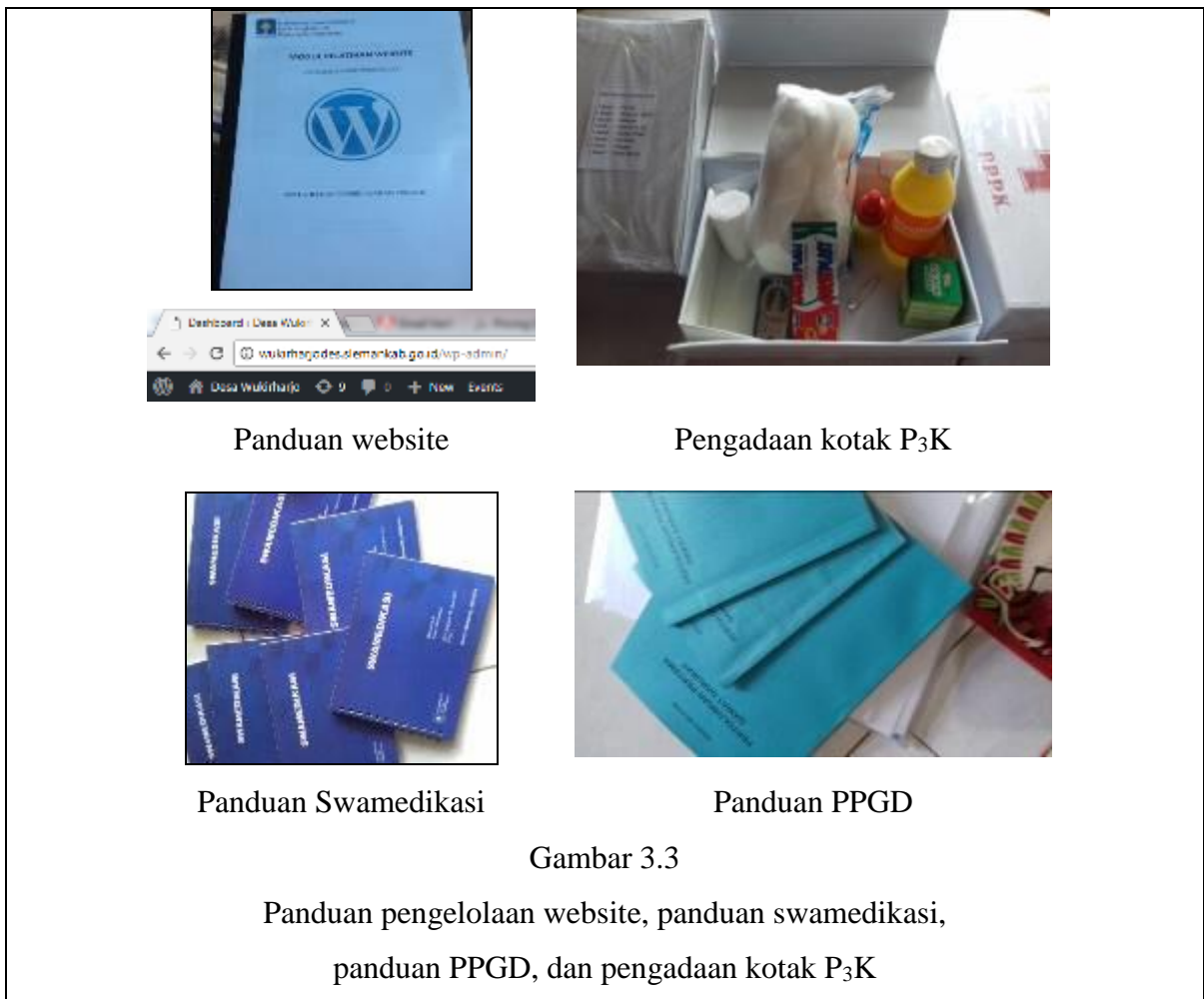
sehingga dapat menyebabkan kerugian dalam penanganan masalah yang melibatkan pada masyarakat luas terlebih kepada kepercayaan masyarakat.

Organisasi harus memiliki kegiatan, baik rutin maupun non rutin yang senantiasa berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM, dan kesiapsiagaan dalam kegiatan pengurangan resiko bencana, maupun ketika terjadi bencana. Tata kelola dalam menentukan pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien disetiap tingkatan membutuhkan adanya visi, rencana, panduan dan koordinasi antar sektor dan partisipasi dari semua pemangku kepentingan (*stakeholder*), sebagaimana mestinya. Untuk itu, memperkuat tata kelola dalam pengelolaan risiko bencana menjadi penting.



Panduan pengelolaan website dibuat dalam modul yang praktis dan aplikatif, sehingga memudahkan petugas pengelola dalam melakukan pengelolaan website Desa (Gambar 3.3). Website ini dapat memperluas akses dan jangkauan informasi timbal balik, baik dari pemerintah pusat ke Wukirharjo, maupun sebaliknya. Manfaat lain dari adanya website ini adalah sebagai wadah untuk mempromosikan potensi-potensi kesenian, budaya, dan produk yang dihasilkan oleh masyarakat Wukirharjo. Disamping panduan pengelolaan website,

dibuat pula panduan swamedikasi dan PPGD bagi masyarakat (Gambar 3.3), yang berisi pengetahuan praktis aplikatif mengenai pengenalan jenis-jenis obat, dan penggunaannya secara tepat untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan obat (*drug abuse*) atau penggunaan obat yang salah (*drug missue*). Sosialisasi ini sekaligus mendukung program GEMA-CERMAT (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat) yang digalakkan oleh organisasi profesi Apoteker (IAI/ Ikatan Apoteker Indonesia). Panduan PPGD menjadi pelengkap kotak P₃K, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terhadap resiko kegawatdaruratan akibat bencana longsor, gempa bumi, angin kencang, dan kekeringan yang memiliki potensi besar di Desa Wukirharjo.



Data sensus penduduk tahun 2016 merupakan hasil dari pendataan kependudukan yang penting dalam kaitannya dengan perencanaan kebutuhan logistik, baik dalam kondisi normal maupun apabila terjadi bencana. Pengurangan resiko bencana harus melibatkan seluruh aspek masyarakat segala usia, termasuk anak-anak usia Sekolah Dasar (SD). Simulasi mitigasi bencana pada anak SD dikemas dengan kegiatan yang melibatkan kemampuan fisik, berpikir,

dan psikologis, sehingga dicapai sinergi pemahaman pada anak-anak bagaimana menjaga lingkungan, membaca tanda-tanda alam, dan berperan serta dalam pengurangan resiko bencana, baik sebelum maupun ketika bencana terjadi (Gambar 3.4).

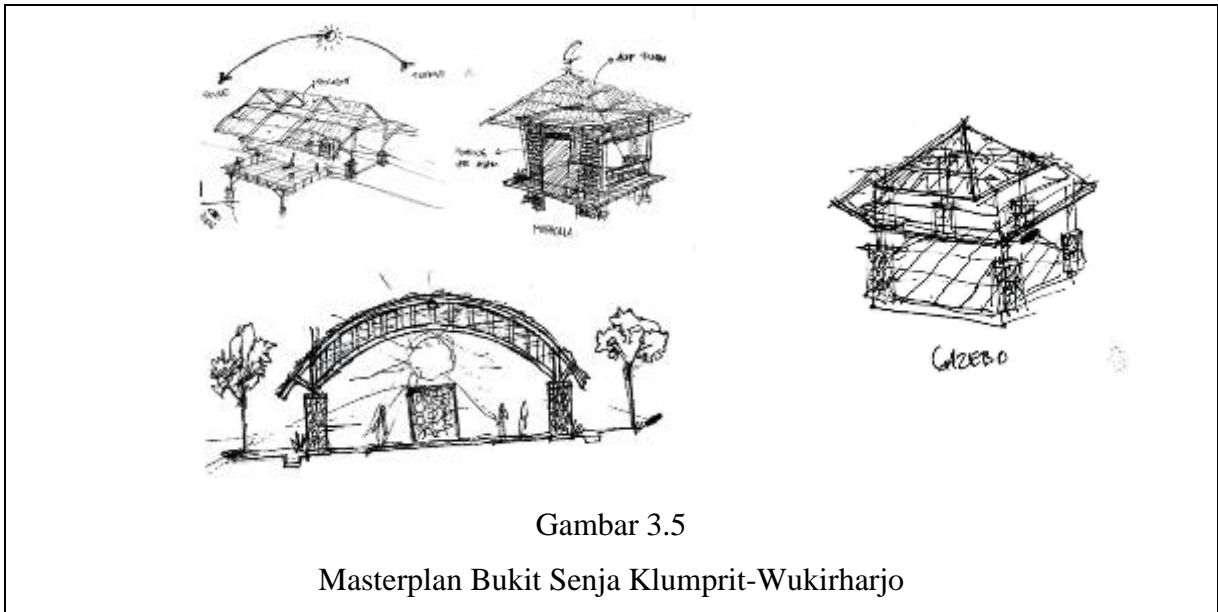
Early Warning System (EWS) merupakan perangkat detektor, yang menjadi peringatan dini bagi masyarakat akan datangnya suatu bencana. EWS ini merupakan perangkat yang dapat mendeteksi beberapa variable, dan memberikan respon bunyi apabila terdapat perubahan sinyal atau getaran yang menjadi parameter terhadap suatu bencana, misalnya gempa bumi atau tanda akan terjadinya longsor, ditandai dengan adanya pergerakan tanah. Dalam bidang penguatan pemulihan perekonomian, masyarakat juga diberikan sosialisasi dan edukasi mengenai rancangan tabungan siaga bencana. Hal ini penting, karena pemulihan paska bencana tidak semata-mata bergantung pada bantuan yang datang dari pihak luar, namun juga harus melibatkan kemandirian masyarakat, sehingga proses pemulihan struktur fisik, ekonomi, maupun psikologis dapat berlangsung lebih cepat (Gambar 3.4).



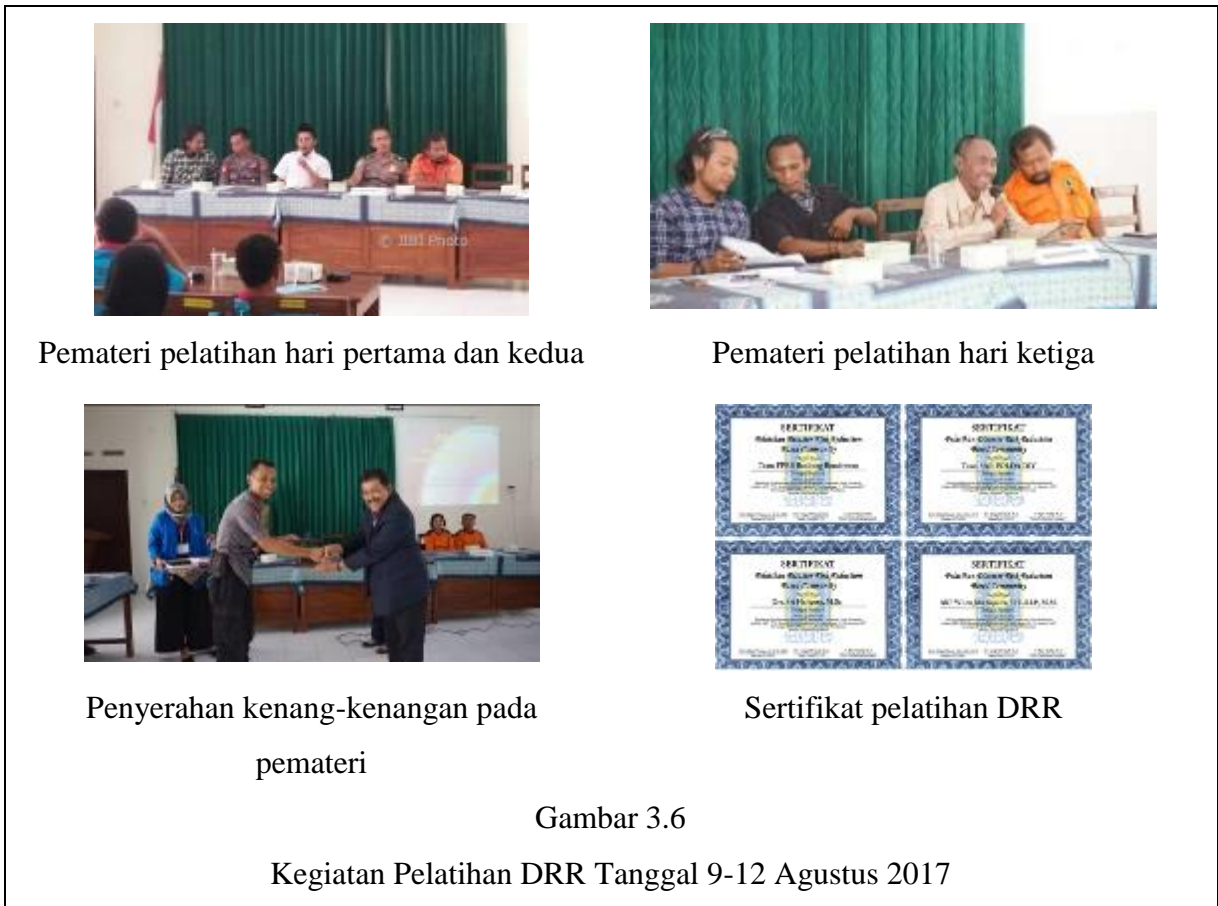
Bukit Senja yang menjadi prospek tempat wisata di Wukirharjo perlu didesain agar sesuai dengan kondisi alam, dan meminimalkan terjadinya resiko bencana. Masterplan yang

*Prosiding Seminar Nasional seri 7
 “Menuju Masyarakat Madani dan Lestari”
 Diseminasi Hasil-Hasil Pengabdian*

tepat harus dibuat sesuai dengan topografi, iklim, cuaca, rencana tata ruang kota yang ada dengan memperhatikan aspek keamanan dan pariwisata (Gambar 3.5).



Kegiatan pelatihan yang dilakukan tiga hari menghadirkan pemateri dari Tim SAR POLDA DIY dan Sekretaris Bersama Jogja Bersatu, dengan melibatkan BPBD Daerah Sleman, Tim FPRB dan Relawan Bandung Bondowoso (Gambar 3.6).



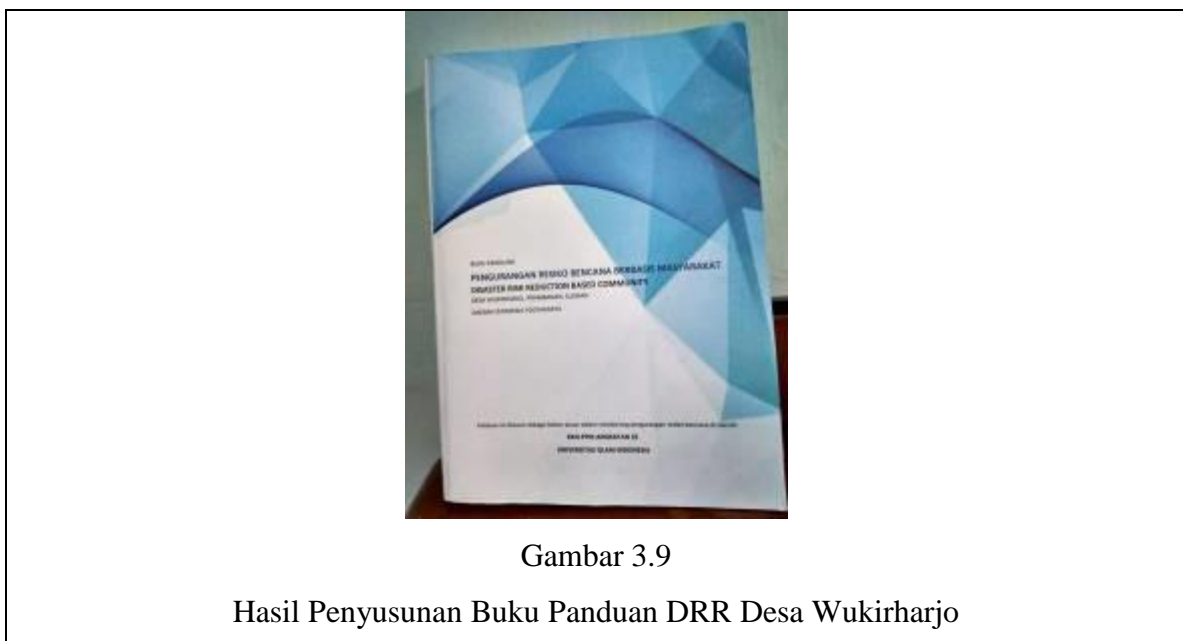
Kegiatan ini dipublikasikan di Media Berita UII, Solopos, Harian Jogja, dan media sosial lainnya. Secara keseluruhan, semua buku panduan dan kegiatan yang dilaksanakan digunakan sebagai bahan penyusun Buku Panduan *Disaster Risk Reduction Based Community*, yang menjadi target akhir dari program kegiatan DRR di Desa Wukirharjo, Prambanan, Sleman (Gambar 3.8).



Gambar 3.8

Publikasi kegiatan Pelatihan DRR 9-12 Agustus 2017

Buku panduan Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat, disusun berdasarkan kondisi wilayah dan keadaan di Desa Wukirharjo, Prambanan, Sleman. Buku panduan ini berisi latar belakang pentingnya FPRB di tingkat desa, dan panduan-panduan terkait pengurangan resiko bencana. Materi dan bahasa yang digunakan dalam buku panduan tersebut, mudah dipahami karena bersifat praktis aplikatif, serta dapat menjadi rekomendasi bagi daerah lain (Gambar 3.9).



Gambar 3.9

Hasil Penyusunan Buku Panduan DRR Desa Wukirharjo

KESIMPULAN

Panduan Penyusunan Forum Pengurangan Resiko Bencana berbasis Masyarakat ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana di daerah, sejak pra bencana, saat bencana dan setelah bencana. Sangat disadari bahwa kondisi masing-masing wilayah tentu berbeda, sehingga perlu penyesuaian beberapa aspek agar dapat diterapkan pada daerah masing-masing.

REFERENSI

- Andriana, R. 2007. Evaluasi Kawasan Lindung Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Wonosobo. http://eprints.undip.ac.id/18791/1/RENI_ANDRIANA.pdf
- Anonim. 2010. Strategi Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Anonim., 2007., Penanggulangan Teknis PKK., Jakarta: Depkes RI.
- Anonim., 2012., Emergency Course Hand Book Untuk Kader Kesehatan., Blitar: BMSI.
- Benson, Charlotte Dkk. 2007. Perangkat Untuk Mengarusutamakan Risiko Bencana. Switzerland. Provention Consortium.
- Bustami, Del Afriadi. 2011. Modul Pelatihan Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana. Jakarta. UNDP.
- Daliyo, dkk. 2008. “Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Alam di Kabupaten Sikka”. LIPI, Jakarta.
- Dirjen Bina Upaya Kesehatan., 2011., Kurikulum Pelatihan PPGD Tim Puskesmas di DTPK., Jakarta: Kemenkes RI.
- Hidayati, Sri dkk. 2009. Modul Pelatihan Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan. Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kriteria Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Tonianto, 2015. Kimia Air Manifestasi Panasbumi dan Airtanah pada Kawasan Dataran Tinggi Dieng, Provinsi Jawa Tengah. Tidak dipublikasikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.